



**PENYAMPAIAN PIDATO  
GUBERNUR DKI JAKARTA  
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA  
DALAM RANGKA  
PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

Oleh :

**Anies Baswedan, Ph.D  
Gubernur DKI Jakarta**

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
Rabu, 22 Juli 2020**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera untuk semuanya.

Yth.- Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
DKI Jakarta;

- Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Daerah  
Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Wakil Gubernur DKI Jakarta;
- Para Anggota Forkopimda DKI Jakarta;
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Hadirin dan undangan yang berbahagia.

Pertama tama, marilah kita sampaikan segala puji dan rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, ridho dan hidayah-Nya, hari ini kita bersama diberikan kemudahan untuk menghadiri acara ***Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta*** dalam rangka ***Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah*** tentang ***Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019***.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,**

Rapat Paripurna hari ini dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara disiplin, mengingat Pandemi Covid-19 saat ini masih terjadi dan kasusnya cenderung meningkat. Saya senantiasa mengingatkan kepada kita semua, bahwa kita bersama harus terus waspada, lebih disiplin, dan secara khusus saya ingin menyampaikan hal ini kepada seluruh masyarakat Jakarta agar jangan pernah menganggap enteng, jangan anggap ringan, jangan merasa kita sudah terbebas dari wabah Covid-19.

Pada Rapat Paripurna ini, izinkan saya menjelaskan tentang realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, yang meliputi ***Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.***

Izinkan saya menjelaskan tentang realisasi ***Pendapatan Daerah.***

***Pendapatan Daerah dalam Tahun Anggaran 2019*** ditargetkan sebesar Rp.74,99 triliun dan terealisasi sebesar Rp.62,30 triliun atau 83,07%, yang terdiri dari:

- ***Pendapatan Asli Daerah (PAD)*** terealisasi sebesar Rp.45,70 triliun atau 89,90% dari target Rp.50,84 triliun, dengan rincian sebagai berikut :
  - Pajak Daerah Rp.40,29 triliun atau 90,48% dari target Rp.44,54 triliun.
  - Retribusi Daerah Rp.587,38 miliar atau 82,71% dari target Rp.710,13 miliar.

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp.619,45 miliar atau 100,17% dari target Rp.618,38 miliar.
- Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Rp.4,20 triliun atau 84,44% dari target Rp.4,97 triliun.
- Komponen kedua dari pendapatan daerah adalah realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp.14,49 triliun atau 68,02% dari target Rp.21,31 triliun, dan
- Komponen ketiga adalah realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah yang mencapai Rp.2,04 triliun atau 73,28% dari target Rp.2,78 triliun.

**Rapat Dewan yang saya hormati,**

Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan penjelasan tentang realisasi ***Belanja Daerah***.

***Belanja Daerah*** ditargetkan sebesar Rp.77,85 triliun, dan terealisasi sebesar Rp.64,93 triliun atau 83,41%, yang terdiri dari:

- Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.29,56 triliun atau 88,80% dari anggaran sebesar Rp.33,29 triliun, dan
- Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp.35,37 triliun atau 79,38% dari anggaran sebesar Rp.44,56 triliun.

Besaran Belanja Daerah tersebut digunakan untuk pelaksanaan program prioritas sesuai dengan 5 Misi dalam RPJMD 2017-2022, antara lain sebagai berikut:

1. Program Prioritas pada Misi pertama yaitu, Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiaikan dengan hasil, antara lain sebagai berikut:
  - Program Wajib Belajar 12 Tahun dianggarkan sebesar Rp.3,03 triliun dan terealisasikan sebesar Rp.2,73 triliun atau 90,32%, di antaranya berupa tersalurkannya *Bantuan Operasional Sekolah* (BOS) SDN/SDLBN, SMPN/SMPLBN, SMAN/SMALBN, dan SMK bagi 1.311.871 siswa dan *Biaya Operasional Pendidikan* (BOP) bagi SD Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri untuk 925.997 siswa, serta Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C di 39 *Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat* (PKBM) Negeri.
  - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dianggarkan sebesar Rp.2,55 triliun dan terealisasikan sebesar Rp.2,20 triliun atau 86,16%, di antaranya berupa rehab total gedung sekolah sebanyak 132 lokasi, rehab berat/ sedang gedung sekolah sebanyak 63 lokasi, pembangunan 3 Unit Sekolah Baru dan 4 Ruang Kelas Baru, serta pengadaan Perlengkapan Satuan Pendidikan untuk 285 sekolah.
  - Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah dianggarkan sebesar Rp.1,60 triliun dan

terrealisasikan sebesar Rp.1,42 triliun atau 88,63%, di antaranya berupa pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi 5.625.237 peserta *Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah*.

- Program Rehabilitasi Sosial dianggarkan sebesar Rp.234,48 miliar dan terealisasi sebesar Rp.207,69 miliar atau 88,58%, di antaranya berupa pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi 4.095 orang *Warga Binaan Sosial (WBS)* di panti-panti sosial milik Pemprov DKI Jakarta dan pemberian bantuan, pelatihan, dan pendampingan usaha ekonomi produktif dengan total penerima manfaat sebanyak 1.855 orang.
  - Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga dianggarkan sebesar Rp.1,71 triliun dan terealisasi sebesar Rp.1,44 triliun atau 84,30%, di antaranya berupa pelaksanaan *Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun* di tingkat kelurahan hingga provinsi, Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan untuk 1.200 atlet, serta Rehab dan Pembangunan 234 Fasilitas Olahraga yang terdiri dari GOR, Gedung, Lapangan dan fasilitas olahraga lainnya.
2. Program Prioritas pada Misi kedua yaitu, Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya

keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang, dengan hasil antara lain sebagai berikut:

- Program Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM dianggarkan sebesar Rp.127,17 miliar dan terealisasikan sebesar Rp.92,18 miliar atau 72,49%, di antaranya berupa rehabilitasi Lokasi Binaan di 6 lokasi, Penataan Sarana dan Prasarana PKL di 12 lokasi, serta pembinaan kewirausahaan dengan jumlah peserta sebanyak 40.000 orang.
- Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan dianggarkan sebesar Rp.101,69 miliar dan terealisasikan sebesar Rp.86,08 miliar atau 84,65%, diantaranya berupa tersusunnya Dokumen Rencana Induk Transportasi Jakarta dan terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi Angkutan Umum untuk 2.000 peserta.
- Program Pengendalian Banjir dan Abrasi dianggarkan sebesar Rp.3,31 triliun dan terealisasikan sebesar Rp.2,11 triliun atau 63,76%, di antaranya berupa pembangunan waduk/situ/embung dan kelengkapannya pada Sistem Aliran Tengah, Sistem Aliran Timur dan Embung Cakung Timur, pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A pada Sistem Aliran Barat di Kali Kamal Muara sisi Barat dan Sistem Aliran Timur sepanjang 278 meter.

- Program Pengelolaan Persampahan dianggarkan sebesar Rp.2,61 triliun dan terealisasi sebesar Rp.1,67 triliun atau 63,92%, di antaranya berupa pembangunan TPS Limbah 83 Skala Kecamatan di Kebon Jeruk dan Rawa Kerbo.
  - Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan dianggarkan sebesar Rp.2,66 triliun dan terealisasi sebesar Rp.1,75 triliun atau 65,84%, di antaranya berupa pembangunan trotoar dan bangunan pelengkap jalan dengan konsep *complete street* sepanjang 34,46 kilometer, serta dimulainya *multi years* pembangunan *Fly Over* Cakung, Tanjung Barat, Lenteng Agung - IISIP, *Under Pass* Senen *Extension*, serta Peningkatan Jembatan Akses Rusun Pesakih.
3. Selanjutnya program Prioritas pada Misi ketiga, yaitu Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas, dengan hasil antara lain sebagai berikut :
- Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN dianggarkan sebesar Rp.11,44 miliar dan terealisasi sebesar Rp.9,08 miliar atau 78,79%, di antaranya berupa Rekrutmen CPNS dengan jumlah pendaftar sebanyak 33.773 orang hingga Pengangkatan CPNS menjadi PNS sebanyak 2.303 orang.



- Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah dianggarkan sebesar Rp.85,75 miliar dan terealisasikan sebesar Rp.67,17 miliar atau 78,33%, di antaranya berupa Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Digitalisasi Aset Daerah.
4. Program Prioritas pada Misi keempat, yaitu Jakarta sebagai kota yang lestari dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial, dengan hasil antara lain sebagai berikut:
- Program Pengelolaan Pertamanan dianggarkan sebesar Rp.1,97 triliun dan terealisasikan sebesar Rp.1,60 triliun atau 81,18%, di antaranya berupa terlaksananya kegiatan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman sebanyak 48 Taman Maju Bersama, serta revitalisasi Taman Puring dan Taman Mataram.
  - Program Penataan Kawasan Pemukiman dianggarkan sebesar Rp.552,66 miliar dan terealisasikan sebesar Rp.337,53 miliar atau 61,07%, di antaranya berupa penyusunan *Community Action Plan* (CAP) di 6 wilayah Administrasi sebanyak 78 RW dan Peningkatan Sarana Prasarana dan Utilitas/*Collaborative Implementation Program* (CIP) di 6 wilayah Administrasi sebanyak 60 RW.

5. Kemudian program Prioritas pada Misi kelima, yaitu Jakarta Ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan, dengan hasil di antaranya:

- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dianggarkan sebesar Rp.250,15 miliar dan terealisasikan sebesar Rp.201,11 miliar atau 80,40%, di antaranya berupa penyelenggaraan Peringatan Kerjasama *Sister City* Jakarta-Berlin, *Jakarta Travel Fair*, Jakarta Bisnis Forum, *Jakarta International Performing Arts*, Festival Jakarnaval, *Jakarta Cosplay Parade*, Festival Kuliner Jakarta, Kepulauan Seribu *Water Sport Competition*, serta festival seni budaya lainnya.

### **Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat,**

Pada bagian berikut, izinkan saya menjelaskan realisasi mengenai ***Pembiayaan Daerah***, yaitu:

- Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.11,78 triliun, yang di antaranya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2018, dan
- Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2019 sebesar Rp.7,93 triliun, diantaranya digunakan untuk penyertaan modal kepada PDAM Jaya, PD Pembangunan Sarana Jaya, PT Jakarta Propertindo, dan PT MRT Jakarta.

Dari realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut, diperoleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp.1,20 triliun.

Selanjutnya saya akan menjelaskan posisi *Neraca Daerah* dan *Arus Kas*, yaitu:

- Neraca Daerah yang disajikan memuat informasi mengenai posisi Aset, kewajiban dan Ekuitas yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2019. Secara garis besar dapat saya sampaikan posisi Neraca Daerah per 31 Desember 2019 terdiri dari Aset sebesar Rp.517,15 triliun, Kewajiban sebesar Rp.10,58 triliun dan Ekuitas sebesar Rp.506,57 triliun.
- Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai kemampuan dalam memperoleh kas dan menilai penggunaan kas untuk memenuhi kebutuhan Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019. Secara umum dapat saya sampaikan Arus Kas periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :
  - Saldo Awal Kas per 1 Januari 2019 sebesar Rp.9,76 triliun,
  - Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp.7,27 triliun,
  - Arus Kas bersih untuk Aktivitas Investasi sebesar minus Rp.15,78 triliun,

- Arus Kas bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar minus Rp.33,62 miliar,
- Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar minus Rp.6,88 miliar,
- Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp.1,2 triliun.

### **Rapat Dewan yang saya hormati,**

*Alhamdulillah* berkat doa dan kerja keras kita bersama, Hasil audit atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019, BPK kembali memberikan opini “*Wajar Tanpa Pengecualian*”, hal ini merupakan penghargaan tertinggi atas proses peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2019 merupakan perolehan ketiga kalinya secara berturut-turut yang diraih sejak Tahun 2017-2019.

Namun, perolehan Opini WTP ini bukan merupakan tujuan akhir, tetapi bagian dari proses peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan demi terwujudnya pengelolaan keuangan pada Tahun 2020, antara lain, yaitu :

- ***Pertama***, Pembenahan sistem perencanaan dan penganggaran daerah melalui implementasi Sistem Informasi *Smart Planning Budgeting*.

- **Kedua**, Pengembangan *Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah* (SIPKD) sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- **Ketiga**, Peningkatan akuntabilitas penatausahaan belanja BOS dan BOP sekolah.
- **Keempat**, Pembenahan penatausahaan aset daerah, dengan melakukan penyempurnaan pengembangan Sistem Informasi Aset Daerah, menetapkan hasil inventarisasi aset Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah yang dilanjutkan dengan penyelesaian aset hasil sensus melalui Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah.
- **Kelima**, Melakukan percepatan tindak lanjut atas *Laporan Hasil Pemeriksaan* (LHP) BPK RI.

Pada kesempatan ini juga saya sampaikan kepada seluruh pimpinan SKPD dan Aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, agar segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK-RI, dan melakukan peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Saya berharap, materi yang saya sampaikan dapat menjadi bahan kajian dalam pembahasan oleh DPRD. Penjelasan lebih rinci mengenai hal-hal yang saya sampaikan dalam pidato ini, disajikan pada buku Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Akhirnya, Eksekutif menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas perhatian Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan terhadap pidato Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang *Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun Anggaran 2019* yang baru saja saya sampaikan.

Eksekutif berharap, Dewan dapat membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah dimaksud menjadi Peraturan Daerah.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya, dalam rangka mewujudkan Jakarta yang Maju Kotanya dan Bahagia Warganya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 22 Juli 2020  
Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D